

THE ROLE OF PRESIDENT B.J. HABIBIE IN OVERCOMING ECONOMIC CRISIS IN INDONESIA IN THE 1998-1999

Agung Mike Wijaya¹, Marjono², Sugiyanto³

¹²³History Education Program, The University of Jember.
Email. Agungmikewijaya94@gmail.com

Abstract

The prolonged economic crisis in Indonesia since the middle of 1997 began with the falling value of the Thai bath currency which influenced the social, economic and political life in Indonesia. The resignation of President Soeharto was replaced by B.J. Habibie as president with a policy direction that emphasizes the people's economic system. At the beginning of his reign, President B.J. Habibie was faced with problems such as the weaker banking system, the corporate world went bankrupt, and the high level of poverty. President B.J. Habibie's trade in overcoming the economic crisis embodied in the policy, among others, the restructuring of banks, the implementation of the social safety net (JPS) program, and the empowerment of the people's economy. Policies committed by President B.J. Habibie gained support from the Indonesian people, and gradually showed a positive picture of Indonesia towards recovery and improvement due to the economic crisis. The Indonesian economy is improving as indicated by the stability of national finance, the corporate world is increasing, and the poverty rate is declining.

Keywords: B.J Habibie, Economic Crisis.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 1997 mengalami masa-masa kritis. Hal ini dikarenakan terjadi krisis keuangan di negara Thailand yang memicu terjadinya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Indonesia. Penurunan nilai tukar rupiah tersebut juga menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi. Permasalahan ekonomi yang terjadi berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan stabilitas politik dalam negeri. Memasuki tahun 1998, kondisi ekonomi di Indonesia semakin memburuk yang diakibatkan karena sistem perbankan yang lemah, dunia usaha mengalami kebangkrutan, dan kemiskinan terus meningkat (Urbaningrum, 1999:38). Sementara ketidakberhasilan Presiden Soeharto dalam menangani krisis menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terjadinya ketimpangan sosial yang terjadi menyebabkan munculnya kerusuhan sosial di masyarakat, akibatnya Presiden Soeharto mendapat tekanan dari masyarakat yang menginginkan reformasi. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Berlandaskan pasal 8 UUD 1995, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie sebagai presiden (Suparno, 2012:193).

Pada awal masa pemerintahan, Presiden B.J. Habibie dihadapkan permasalahan-permasalahan seperti dunia usaha mengalami kemacetan, kelangkaan bahan pangan, tingkat kemiskinan tinggi, dan lemahnya sistem perbankan (Basri, 2002:44). Situasi semakin memburuk ketika perusahaan mengalami penurunan produksi barang dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya pengangguran di dalam negeri semakin meningkat, hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat di bawah garis kemiskinan semakin tidak terkontrol. Sepanjang tahun 1997 sampai pertengahan tahun 1998 jumlah penduduk miskin mencapai 48,99 juta orang atau sekitar 23,4 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia (Manning *et al*, 2002:183). Presiden B.J Habibie dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan melakukan program pemberdayaan rakyat melalui UKM, KUT, dan program jaring pengaman sosial (JPS).

Program yang ditempuh Presiden B.J. Habibie dalam melakukan pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat dengan mendorong usaha kecil menengah berkembang secara efisien dan mandiri, serta dapat kerja sama saling menguntungkan dengan perusahaan besar (Habibie, 2006:352). Presiden percaya bahwa mekanisme pasar dalam mengorganisir pertumbuhan ekonomi nasional dapat mengatasi krisis ekonomi yang

sedang berlangsung. Presiden B.J. Habibie juga beranggapan bahwa mata uang yang stabil merupakan pilar utama dari perekonomian yang sehat. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie dalam usaha mengatasi krisis moneter di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia menjelang Presiden Soeharto turun dari kekuasaan pemerintahan yang digantikan pemerinatahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998, bagaimana upaya-upaya Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998-1999, bagaimana pengaruh kebijakan Presiden B.J. Habibie terhadap usaha pemulihan krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998-1999. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia menjelang Presiden Soeharto turun dari kekuasaan pemerintahan yang digantikan pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998, untuk mengkaji upaya-upaya Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998-1999, untuk mengkaji pengaruh kebijakan Presiden B.J. Habibie terhadap usaha pemulihan akibat krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998-1999. Manfaat penelitian ini yaitu bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah wawasan dan pendalaman materi mengenai peranan Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998-1999, bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai peranan Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998-1999, bagi almamater, sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang melalui empat tahap yaitu: heuristik, interpretasi, kritik, dan historiografi (Gottschalk: 1985:32). Tahap heuristik peneliti mencari, mengumpulkan sampai menemukan sumber-sumber sejarah sesuai kajian yang akan diteliti (Gottschalk, 1985:35; Sjamsudin, 1996:67). Peneliti mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder berupa buku, artikel, skripsi, koran, majalah, dan internet yang relevan dengan penelitian.

Langkah kedua yaitu kritik, peneliti melakukan penyelidikan terhadap kredibilitas dari sumber-sumber untuk memperoleh keautentikan dan keabsahan sumber melalui kritik

ekstern dan kritik intern (Gottschalk, 1985:95; Abdurrahman, 2007:68). Kritik ekstern yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melihat sampul, tahun terbit, judul, dan nama pengarang yang bertujuan untuk mengkaji otentitas dan keabsahan sumber. Kritik intern dilakukan untuk menilai isi sumber yang telah terbukti otentitasnya dengan menguji kredibilitasnya, sehingga diperoleh fakta-fakta sejarah.

Langkah ketiga yakni interpretasi, peneliti melakukan penguraian atau analisi dan sintesis terhadap fakta-fakta yang kemudian dirangkai dan dihubungkan menjadi suatu bentuk yang logis, rasional, dan objektif sehingga menjadi fakta yang rasional dan faktual berdasarkan pada aspek pembahasan (Gottschalk, 1985:144; Kuntowijoyo, 2013:78).

Langkah terakhir yaitu historiografi, peneliti merekonstruksi fakta-fakta dan peristiwa sejarah dari hasil heuristik, kritik, dan interpretasi (Gottschalk, 1985:143). Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia Menjelang Presiden Soeharto Turun dari Kekuasaan Pemerintahan yang Digantikan Pemerintahan B.J. Habibie Tahun 1998

Kondisi Sosial

Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang sudah berjalan selama 32 tahun, pembangunan ekonomi banyak kemajuan. Akan tetapi, memasuki tahun 1997 kondisi perekonomian terus memburuk, karena terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pada masa krisis ekonomi, kondisi ketenagakerjaan tercatat sejak bulan Mei 1997 sampai Mei 1998 yang mengalami PHK sebesar 4,197 juta pekerja. Akibatnya, tingginya tingkat PHK menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang juga berdampak pada krisis sosial (Habibie, 2006:405). Hal ini terjadi karena pada pertengahan tahun 1997 sektor industri mengalami penurunan produksi, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga melakukan PHK. Hal tersebut berimplikasi terhadap kondisi pendidikan dalam negeri, keterbatasan materi dan sulinya mendapatkan pekerjaan menyebabkan masyarakat miskin tidak sanggup melanjutkan pendidikan anak.

Survei yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 1998 menunjukkan bahwa dampak krisis yang berlangsung telah menyebabkan terjadinya putus sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Survei yang dilakukan dua bulan setelah awal tahun pelajaran, banyak ditemukan siswa-siswi yang putus sekolah. Pendaftaran siswa baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sangat sedikit mencapai 14,4 persen laki-laki dan 19,4 persen perempuan (Manning *et al*, 2000:187).

Kondisi Ekonomi

Krisis di Indonesia tahun 1997 menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada kisaran Rp. 14.000 dan Rp. 17.000. Ketika kurs mata uang rupiah terus menurun akibat tekanan dari spekulasi, BI pada tanggal 14 Juli 1997 memutuskan untuk menggabungkan atau konversi nilai kurs rupiah dengan mata uang asing yang kemudian menyebabkan para investor menarik semua modalnya dari pasar modal dan pasar mata uang (Gie, 1999:331). Akibatnya, kegiatan ekonomi dalam negeri mengalami kemacetan karena kurangnya fungsi BI sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak efisien dalam menangani krisis.

Dengan dilakukannya pengetatan moneter yang dilakukan oleh perbankan berdampak pada kondisi dunia usaha dalam negeri. Banyak perusahaan yang tidak dapat meningkatkan jumlah produksinya mengalami kebangkrutan karena mahal biaya kredit. Padahal kredit melalui investasi merupakan salah satu cara dalam membangun pertumbuhan ekonomi ketika krisis sedang berlangsung. Dua sektor yang jumlah produksinya mengalami penurunan pada awal tahun 1998 yakni perdagangan yang mencapai -18,9 persen dan industri manufaktur yang mencapai -13 persen (Tambunan, 2002:65).

Kondisi Politik

Di struktur politik pada pemerintahan, konflik sudah terjadi seiring dengan goyahnya pemerintahan Presiden Soeharto. Kebijakan pemerintah yang tidak dapat mengatasi krisis mengakibatkan kondisi ekonomi semakin memburuk, hal ini menyebabkan terjadinya pergolakan dalam kehidupan masyarakat yang menginginkan reformasi. Sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi oleh pemerintahan Orde Baru menyebabkan terjadinya konglomerasi. Sehingga menyebabkan kecemburuan sosial pada masyarakat, selain itu KKN

semakin jelas dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah misalnya kasus proyek mobil nasional, kasus monopoli cengkeh nasional yang merugikan para petani cengkeh di dalam negeri.

Menjelang sidang istimewa MPR 1998, kondisi politik semakin memanas. Puncaknya ketika pencalonan kembali Presiden Soeharto memperburuk situasi karena mahasiswa menginginkan Presiden Soeharto turun dari pemerintahan. Aksi-aksi mahasiswa semakin bertambah di kawasan Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa memadati halaman DPR, menaiki kubah gedung dan ruang lobi. Seolah menjawab tuntutan mahasiswa Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, berlandaskan pasal 8 UUD 1945 Presiden Soeharto segera menunjuk B.J. Habibie menggantikan posisinya sebagai Presiden RI (Habibie, 2006:65). Namun, peralihan jabatan yang dilakukan Presiden Soeharto menyebabkan pandangan-pandangan negatif di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie di awal masa jabatannya akan melakukan reformasi dan penyelesaian krisis ekonomi. Hal ini menimbulkan empati dan simpati dari masyarakat Indonesia, sehingga pandangan-pandangan negatif secara perlahan sebagian masyarakat tidak mempermasalahkan peralihan tersebut.

Upaya-Upaya Presiden B.J Habibie dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1998-1999

Program Restrukturisasi Perbankan

Pada awal pemerintahannya tahun 1998 Presiden B.J. Habibie menghadapi kondisi perbankan yang lemah. Sektor perbankan tidak berfungsi sebagai intermediasi aliran danan karena banyak ditemukan bank-bank yang bermasalah. Presiden B.J. Habibie melakukan likuidasi 38 bank, pengambilalihan 7 bank, dan rekapitalisasi 9 bank. Program tersebut diawasi langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bank-bank yang dilikuidasi sudah dikategorikan oleh BPPN (Gie, 1999:168). Pemerintah melalui BPPN mengontrol langsung likuidasi bank sehingga hal ini tidak terjadi penyalahgunaan tabungan nasabah dan bisa meningkatkan kepercayaan terhadap bank-bank yang beroperasi.

Perkembangan program likuidasi bank-bank yang bermasalah berdampak pada peningkatan investor asing yang mulai melakukan kegiatan ekonomi dan bahkan beberapa telah mengambil alih saham bank. Hal tersebut berdampak pada menguatnya rupiah dan

terkendalinya inflasi. Laju inflasi tahunan selama tahun 1998 masih sebesar 77,5 persen, pada tahun 1999 menjadi 2,01 persen (Pratiknya, 1999:30).

Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Ketika krisis mulai memburuk, bersamaan dengan terjadinya kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden B.J. Habibie mendapat tekanan berat, masyarakat yang berada dibawah kemiskinan pada tahun 1998 mencapai 100 juta orang. Pemerintah melakukan program bantuan langsung di bidang sosial budaya sesuai TAP MPR NO.X / MPR / 1998 tentang penanggulangan dampak krisis ekonomi (Habibie, 2006:381). Program JPS terfokus pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Dalam bidang kesehatan Presiden B.J. Habibie menyalurkan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau 36 ribu desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden B.J. Habibie dalam memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, menyalurkan bantuan makanan tambahan bagi 8 juta anak (Habibie, 2006:381). Sedangkan dalam pendidikan Presiden B.J. Habibie juga menyalurkan beasiswa kepada 4 juta anak yang terancam putus sekolah, dan bantuan operasional bagi 130 ribu sekolah di seluruh Indonesia (Manning *et al*, 2000:191). Dengan program bantuan langsung dari pemerintah secara bertahap mengurangi dampak krisis bagi masyarakat miskin.

Program Pemberdayaan Rakyat

Memburuknya ekonomi makro sejak pertengahan tahun 1997 sektor dunia usaha semakin melemah hingga tahun 1998. Salah satu program Presiden B.J. Habibie membangun sistem ekonomi yang berjiwa kerakyatan, sasarannya adalah memperkuat sistem ekonomi rakyat. Sehingga mencipatakan masyarakat kelas kecil menengah mencapai jumlah mayoritas (Pratiknya, 1999:39). Pemerinatah juga memberi landasan bagi perekonomian yang lebih maju, mandiri serta mengandalkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UKM terkandung dalam TAP MPR NO.X dan TAP MPR NO.XVI / MPR/ 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Presiden B.J. Habibie telah melakukan langkah-langkah dalam rangka

pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil menengah dan koperasi. Pada tahun 1998-1999 dana yang disediakan untuk program UKM dan KUT sebesar Rp. 8,8 triliun yang disalurkan kepada 5,13 juta petani melalui 189 ribu kelompok petani, dan 9,5 ribu koperasi di seluruh wilayah Indonesia (Habibie, 2006:349). Dengan demikian, berkembangnya usaha rakyat kecil menengah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga kebijakan Presiden B.J. Habibie mengarah pada proses pemulihan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Pengaruh Kebijakan Presiden B.J. Habibie Terhadap Usaha Pemulihan Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1998-1999

Stabilitas Keuangan Nasional

Perbaikan pada sistem perbankan telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan sebelumnya mengalami penurunan hingga -7 persen setiap tahunnya, maka dalam pemerintahan Presiden B.J. Habibie pertumbuhan ekonomi nasional meningkat menjadi 13 persen pada akhir tahun 1998. Stabilitasnya keuangan nasional yang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri merupakan dampak menurunnya laju inflasi dan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang.

Hingga bulan Agustus tahun 1999 inflasi terus menurun dan Indeks Harga Konsumen semakin stabil, hal ini membuktikan program Presiden B.J. Habibie dalam penanganan krisis ekonomi mengarah pada stabilitas ekonomi yang semakin stabil. Nilai rupiah menguat sampai bulan Juli 1999 sebesar Rp. 7.000 per dolar AS, Padahal pada awal tahun 1998 sebesar Rp. 17.000. Sehingga dengan menguatnya rupiah tersebut berdampak pada penurunan laju inflasi (Habibie, 2006:492). Menurunnya inflasi didukung juga dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank milik negara maupun swasta.

Beberapa indikator ekonomi lainnya ditunjukkan melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I dan II tahun 1999 yaitu sebesar 1,31 persen dan 0,46 persen pada triwulan sebelumnya. Dari kecenderungan PDB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi tahun 1999 mencapai 1 persen (Habibie, 2006:346). Secara bertahap masyarakat kembali menukarkan uang dengan barang atau dengan valuta asing. Dengan demikian,

semakin banyak rupiah kembali masuk ke bank-bank dalam negeri dan perekonomian nasional semakin membaik.

Dunia Usaha Meningkat

Menguatnya rupiah, terkendalinya inflasi serta menurunnya suku bunga, menjadi awal kebangkitan dunia usaha dalam negeri selama krisis ekonomi. Presiden B.J. Habibie percaya bahwa mekanisme pasar yang baik merupakan kunci dari setiap negara untuk meraih pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan dunia usaha merupakan salah satu langkah penting dan strategis dalam jangka panjang dalam mengembalikan roda perekonomian nasional.

Dalam menunjang dunia usaha, Presiden B.J. Habibie menciptakan landasan agar tumbuh persaingan yang sehat dan efisien. Presiden B.J. Habibie bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Habibie, 2006:352). Selain itu, di dalam mendukung dunia usaha sektor industri dan kesejahteraan buruh dalam negeri. Presiden B.J. Habibie meletakkan sendi-sendi kehidupan bagi pekerja atau perburuhan yang demokratis dengan melengkapi dan meratifikasi empat Konvensi ILO, yang menyangkut hak-hak di tempat kerja. Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi, Konvensi ILO nomor 111 tentang larangan diskriminasi dalam jabatan dan pekerjaan, dan Konvensi ILO nomor 138 tentang batas usia untuk memasuki pekerjaan (Pratiknya, 1999:57).

Tingkat Kemiskinan Meningkat

Presiden B.J. Habibie dalam upaya menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dengan melakukan program Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Mengurangi Kemiskinan (PDKMK) dan program Penanggulangan Penganggur Terampil (P3T). Program PDKMK telah mengatasi 3,4 juta penduduk miskin selama 3 sampai 4 bulan. Program P3T telah mempekerjakan sebanyak 70 ribu orang tenaga kerja terampil pada lembaga ekonomi produktif yaitu koperasi dan perusahaan kecil menengah (Habibie, 2006:405). Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pendapatan per kapita masyarakat.

Data BPS bulan Agustus tahun 1999 dibandingkan dengan hasil survei pada bulan Desember tahun 1998 terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin sebesar 12 juta orang

atau penurunan sebesar 25 persen (Laporan BPS tahun 1998-1999). Selain itu, program jaring pengaman sosial (JPS) bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang sudah dijalankan oleh Presiden B.J. Habibie bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan dipadukan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman untuk mewujudkan pemukiman yang layak, sehat, dan terjangkau khususnya bagi keluarga miskin. Masyarakat diberi pelajaran cara menabung dan mempergunakan kredit yang bunga kreditnya diberikan secara subsidi. Hasilnya sekitar 11,2 juta keluarga telah belajar menabung dengan jumlah tabungan sebesar Rp. 159 miliar. Keluarga yang mempunyai tabungan tidak kurang dari 9,3 juta mendapatkan kredit usaha kesejahteraan rakyat (Kukesra) agar terlepas dari kemiskinan (Habibie, 2006:410).

KESIMPULAN DAN SARAN

Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997 membuat masyarakat Indonesia hidup dalam kesulitan. Muncul permasalahan multikompleks yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak mampu mengatasi krisis, akhirnya membawa B.J. Habibie tampil menjadi presiden. Presiden B.J. Habibie dalam mengembalikan roda perekonomian nasional menekankan pada tiga prinsip pokok yakni kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian. Kebijakan yang dilakukan diantaranya program restrukturisasi perbankan, pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS), dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil menengah.

Program restrukturisasi perbankan berdampak pada menurunnya laju inflasi sebesar 2,01 persen, nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar AS mencapai Rp. 7.000, menurunnya suku bunga deposito sebesar 13 persen. Sehingga menurunnya inflasi, menguatnya rupiah, dan menurunnya suku bunga deposito berdampak pada meningkatnya pelaku ekonomi di dalam negeri. Selain itu, program JPS telah mengurangi beban masyarakat miskin pada masa krisis. Kebijakan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie telah membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi, walaupun kebijakannya tidak berjalan secara optimal dan banyak menghadapi kendala.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang disampaikan oleh peneliti adalah: (1) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai peranan Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di

Indonesia tahun 1998-1999; (2) bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peranan Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998-1999.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: (1) Drs. Marjono, M.Hum., selaku dosen pembimbing I, dan Drs. Sugiyanto, M.Hum., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, motivasi, dan pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi dan jurnal ini; (2) Drs. Sumarjono, M.Si., selaku penguji I, dan Dr. Sumardi, M.Hum., selaku penguji II, yang telah memberikan masukan dan evaluasi dalam penyempurnaan skripsi dan jurnal ini; (3) kedua orang tua yang telah mendidik, memberikan doa, dan memberikan motivasi selama ini, serta semua pihak yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, K. K. 1999. *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum Akan Segera Berlalu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Habibie, B. J. 2006. *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT. Yayasan Bentang Budaya.
- Manning, C. & Diermen P.V. 2000. *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis*. Penerjemah: Landung Simatumpang. Yogyakarta: LKIS.
- Pratiknya, A. W. 1999. *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie*. Buku Satu. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Suparno, B. A. 2012. *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tambunan, T. 2002. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Urbaningrum, A. 1999. *Ranjau-ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.